

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul “Partai Persatuan Pembangunan: Pemilihan Umum Tahun 1977 Di Kodya Bandung”, ini menggunakan metode historis dengan studi literatur dan wawancara sebagai teknik penelitiannya.

Sejarah memiliki metode yang digunakan oleh para sejarawan untuk merekonstruksi masa lalu yang disebut metode historis atau sejarah. Pengertian dari metode historis atau metode sejarah diungkapkan oleh Gottschalk (1975: 32), sebagai proses menguji dan menganalisis secara kritis analitis dan imajinatif berdasarkan rekaman dan peninggalan masa lampau dan hasilnya dituangkan berupa historiografi. Sedangkan menurut Gilbert J. Carraghan dijelaskan bahwa metode penelitian sejarah atau lazim disebut metode sejarah adalah seperangkat aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan menyajikan sintesa dari hasil-hasil yang dipakai dalam bentuk tertulis (Nur, 2001: 74).

Penulis menganggap bahwa metode historis merupakan metode yang cocok digunakan dalam penelitian ini. Metode ini terdiri dari beberapa langkah yang harus dilalui penulis dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau. Menurut Ismaun (2005: 48-50), langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian sejarah adalah sebagai berikut:

Pertama Heuristik, yaitu kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah atau jejak-jejak masa lalu yang relevan. Pada tahapan ini penulis harus menentukan sumber yang cocok untuk menjawab persoalan atau permasalahan dalam penelitaian, baik sumber yang berbentuk primer seperti hasil wawancara, arsip-arsip, dan koran tentang hasil Pemilu tahun 1977, maupun sumber sekunder seperti buku-buku.

Kedua Kritik, yaitu menyeleksi atau menyaring keotentikan jejak-jejak atau data-data yang telah ditemukan. Pada tahap ini penulis melakukan pengkajian mendalam terhadap sumber-sumber sejarah yang telah didapatkan dengan cara mengkritik dan menganalisis materi dari berbagai literatur atau buku-buku, dan arsip-arsip, juga hasil wawancara.

Ketiga Interpretasi, yaitu memaknai atau memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh dengan cara menghubungkan satu sama lainnya. Pada tahapan ini penulis mencoba menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian. Penafsiran terhadap fakta-fakta mengenai Pemilu PPP di Kodya Bandung tahun 1977.

Keempat Historiografi, yaitu penyajian penulisan yang dilakukan dari hasil interpretasi untuk mewujudkan cerita sejarah, dalam tahapan ini penulis berusaha untuk memproses terhadap informasi dan sumber sejarah yang didapatkan dari berbagai sumber untuk kemudian ditulis menjadi suatu kisah sejarah yang ilmiah dalam bentuk skripsi dengan gaya bahasa yang dapat dimengerti juga menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di UPI.

Sjamsuddin (1996: 69) mengungkapkan, paling tidak, ada enam tahap yang harus ditempuh dalam penelitian sejarah, yaitu:

Pertama, memilih topik yang sesuai, *kedua*, mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik, *ketiga*, membuat catatan tentang itu, apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan topik yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung, *keempat*, mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan (kritik sumber), *kelima*, menyusun hasil-hasil penelitian ke dalam suatu pola yang benar dan berarti, yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan sebelumnya, *keenam*, menyajikannya dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikannya kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti se jelas mungkin.

Penyusunan skripsi ini mencakup keempat atau keenam langkah di atas yang merupakan kegiatan inti penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan mengemukakan sejumlah rangkaian kegiatan yang harus ditempuh, yang terpolakan dalam tiga bagian mulai dari persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan laporan penelitian. Ketiga tahap penelitian tersebut akan lebih dijabarkan di bawah ini sebagai berikut:

A. Persiapan Penelitian

1. Pengajuan dan Penentuan Tema Penelitian

Langkah awal dari tahap ini adalah memilih dan menentukan tema penelitian. Hal ini setelah penulis membaca sumber-sumber tentang partai politik terutama partai politik Islam yang ada di Indonesia. Langkah selanjutnya penulis

mencoba mengajukan rancangan judul penelitian kepada Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS) Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI. Judul yang diajukan adalah “ Partai Persatuan Pembangunan: Pemilihan Umum Tahun 1977 Di Kodya Bandung”. Setelah judul tersebut disetujui penulis diperkenankan untuk melakukan penelitian dan menyusun suatu rancangan penelitian dalam bentuk proposal.

2. Penyusunan Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan kerangka dasar yang dijadikan rujukan dalam penyusunan laporan penelitian. Salah satu prosedur yang harus dipenuhi sebelum menyusun laporan penelitian adalah menyusun rancangan penelitian dalam bentuk proposal penelitian.

Proposal penelitian yang diajukan tersebut pada dasarnya memuat :

1. Judul Penelitian
2. Latar Belakang Masalah
3. Perumusan Masalah
4. Tujuan Penulisan
5. Tinjauan Pustaka
6. Metode Penelitian dan Teknik Penelitian
7. Sistematika Penelitian

Rancangan ini diserahkan kepada TPPS untuk kemudian pihak TPPS menyerahkan rancangan penelitian tersebut kepada pembimbing sementara untuk dikaji apakah rancangan telah layak untuk diseminarkan atau tidak. Setelah

melalui beberapa revisi akhirnya proposal yang telah dirancang itu dapat diseminarkan pada tanggal 30 Mei 2007. Dalam seminar tersebut penulis mempresentasikan dan mendiskusikan rancangan proposal dihadapan para dosen yang hadir pada saat itu, rancangan proposal yang telah disetujui oleh TPPS sebelumnya. Banyak masukan-masukan yang penulis dapatkan, sehingga rancangan proposal tersebut berusaha untuk disempurnakan menjadi sebuah skripsi yang utuh dan bermanfaat.

Masukan-masukan tersebut diantaranya adalah tentang pertanyaan permasalahan penelitian yang pada awalnya pertanyaan tersebut berjumlah empat pertanyaan penelitian, akan tetapi setelah mendapatkan masukan pertanyaan penelitian menjadi tiga permasalahan.

Judul yang diajukan penulis pada awalnya adalah “Partai Persatuan Pembangunan: Pemilihan Umum Tahun 1977 Di Kodya Bandung”, kemudian penulis sempat merubah judul tersebut menjadi “Dinamika Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilihan Umum Tahun 1977 Di Kodya Bandung”. Akan tetapi setelah penulis melakukan bimbingan, dan mengingat beberapa hal akhirnya judul skripsi kembali pada judul pertama.

3. Konsultasi

Proses konsultasi baik itu dengan pembimbing I dan II sangat diperlukan untuk menentukan langkah yang tepat dalam proses penyusunan skripsi ini. Pada tahap awal, setelah seminar Pra-Rancangan Penulisan Skripsi, penulis melakukan konsultasi kepada Pembimbing I dan II, dalam rangka menentukan teknis dan

waktu pelaksanaan bimbingan, agar proses bimbingan dapat berjalan efektif dan efisien.

Proses bimbingan yang dilakukan biasanya disesuaikan dengan waktu dan tempat yang telah disepakati sebelumnya antara dosen pembimbing dengan penulis. Setelah terjadi kesepakatan, maka penulis mengikuti prosedur bimbingan yang diberikan pembimbing I dan II, di mana jadwal konsultasi tersebut dilaksanakan secara kontinyu dengan membahas satu, dua atau tiga bab yang diajukan setiap pertemuannya dan tercatat dalam lembar bimbingan. Selama proses ini penulis mendapatkan masukan mengenai penelitian terutama mengenai judul dan fokus permasalahan dalam skripsi ini.

4. Mengurus perijinan

Perijinan merupakan salah satu tahap yang harus dilalui untuk kelancaran proses pelaksanaan penelitian, dalam mencari sumber-sumber yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian. Perijinan yang dimaksud adalah berbentuk surat keterangan pengantar atau rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak baik secara individu maupun lembaga. Adapun surat-surat pengantar tersebut yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor I antara lain ditujukan kepada:

1. Kepala KPU (Komisi Pemilihan Umum) Propinsi Jawa Barat di Bandung
2. Kepala KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Bandung
3. Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Propinsi Jawa Barat di Bandung
4. Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Bandung
5. Kepala Kantor Pemerintah Kota Bandung

6. Kepala Badan Arsip Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung
7. Kepala Perpustakaan Gedung Sate Bandung
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Limnas Propinsi Jawa Barat di Bandung
9. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung
10. Pimpinan DPW PPP Propinsi Jawa Barat di Bandung
11. Pimpinan DPC PPP Kota Bandung
12. Pimpinan Redaksi Harian Umum Pikiran Rakyat di Kota Bandung

B. Pelaksanaan Penelitian

Bagian ini merupakan tahap penting dari sebuah penelitian, setelah semua persiapan penelitian selesai. Langkah-langkah yang ditempuh dalam mengkaji permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini penulis melakukan heuristik, kritik, penulisan, dan interpretasi sejarah (Historiografi). Adapun kegiatan-kegiatan tersebut akan diuraikan di bawah ini:

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik atau pengumpulan sumber merupakan langkah awal yang dilakukan oleh penulis dalam pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini penulis berusaha mencari, menemukan dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dikaji. Sumber sejarah ini adalah segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan kepada kita

tentang sesuatu kenyataan kegiatan manusia pada masa lalu (Sjamsuddin, 1996: 73).

Sumber sejarah terbagi dua yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber yang keterangannya diperoleh secara langsung oleh yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala sendiri. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang keterangannya diperoleh oleh pengarangnya dari orang lain atau sumber lain. Sumber sekunder cerita-cerita atau penuturan dan catatan mengenai suatu peristiwa yang tidak disaksikan sendiri oleh pelapor, namun dalam hal ini mungkin pelapor pernah berbicara dengan saksi mata. Meskipun begitu, bila tidak memperoleh sumber primer bisa menggunakan sumber sekunder.

A. Sumber Tertulis

Pelaksanaan pengumpulan sumber tertulis diawali dengan mengunjungi tempat-tempat yang menyimpan sumber-sumber tertulis, baik perpustakaan, toko buku, dan lembaga-lembaga yang menyimpan dokumen yang dibutuhkan. Adapun pelaksanaan pengumpulan sumber tertulis, penulis lakukan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan diantaranya:

1. Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia. Dari perpustakaan ini penulis mendapatkan sumber-sumber litelatur yaitu: Karya Farchan Bulkin (1985) *Analisis Kekuatan Politik Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES Syamsuddin Haris, dan Riza Sihbudi (1995) *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*. Jakarta: Gramedia, Alfian dan Nazaruddin S.(1988) *Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia*. Jakarta: IAPI,

Rusli Karim, (1993). *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Arbi Sanit (1993) *Sistem politik Indonesia: Kesetabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

2. Perpustakaan Museum Konferensi Asia Afrika. Di perpustakaan ini penulis mendapatkan buku-buku yang cukup representatif yaitu: Buku yang berjudul *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik* (1994), dan buku yang berjudul *Partisipasi Dan Partai Politik Indonesia Pada Awal Orde Baru* (1992), dimana kedua buku tersebut di tulis oleh William Liddle, dan buku yang ditulis oleh Syamsuddin Haris (1991), *PPP Dan Politik Orde Baru*, selain itu penulis menemukan buku yang ditulis oleh Zaenal Abidin Amir (2003) dengan judul *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*.

3. Perpustakaan *Centre For Strategic And International Studies* (CSIS). Di perpustakaan ini penulis mendapatkan banyak sumber yang sangat memadai terutama yang berhubungan dengan politik Islam, buku-buku tersebut antara lain: *Strategi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Semasa 1973-1982: Suatu Studi tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional* (1984) karya Umaid Radi, *Dibalik gejolak Politik PPP: Persaingan NU dan MI, Refleksi Menjelang Suksesi* (1994) karya Agus Miftach, *Politik Islam Politik: Pergulatan Ideologi PPP Menjadi Partai Islam* (2006) buku ini ditulis oleh Abdul Aziz, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama* (tanpa tahun) karya

Maksoem Machfoed, *Multi Partai Menuju Kehidupan Islam* (2000), karya M Fachry, *Kebangkitan Islam Era Orde baru* (1993), yang ditulis oleh Ridwan Saidi, *Dimanika Islam Di Indonesia* (1985), ditulis oleh M Rusli Karim, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (1996) Pengarang Abdul Aziz Thaba, buku lain yang berjudul *Negara Dan Peminggiran Islam Politik*, karya M Rusli Karim.

Selain buku-buku tentang politik Islam, penulis juga mendapatkan buku lain diantaranya: *Pemilu Dan Kekerasan Politik* (1999) karya Hermawan Sulistio, *Pemilu Demokratis Kompetitif* (1991) karya M Rusli Karim, dan buku karya Sjamsuddin Haris (1998) *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*.

4. Perpustakaan Daerah Jawa Barat. Dari Perpustakaan ini penulis tidak banyak mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan, karena sumber yang dimaksud sudah terwakili terutama dari perpustakaan CSIS, hanya saja penulis menemukan buku karya Poerwantana (1994) *Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sedangkan dalam kunjungan ke Perpustakaan Universitas Pasundan (UNPAS), Perpustakaan Balai Kota dan Perpustakaan Universitas Padjajaran (UNPAD), dan perpustakaan Universitas Parahyangan (UNPAR) penulis tidak menemukan sumber buku yang relevan dengan kajian penelitian. Selain itu dalam pengumpulan sumber penulis juga mengunjungi berbagai toko buku dan warnet sebagai bahan pelengkap dari sumber buku.

Data lain yang sangat penting adalah arsip atau dokumen. Dalam pencarian data arsip atau dokumen penulis cukup kesulitan karena sumber-sumber tersebut merupakan sumber primer yang menduduki tempat utama dalam sumber sejarah, yang tidak cukup tersedia sebagaimana halnya sumber sekunder atau dalam hal ini sumber literatur. Tetapi ada beberapa dokumen atau arsip yang penulis anggap relevan yaitu:

1. *Laporan Evaluasi Daerah Tentang Hasil Pemilu Tahun 1977*. BAPILU Golkar Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. *Hasil Pemilu (Pemilihan Umum) Tahun 1971,1977,1981,1987*. Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Barat.
3. *Pemilihan Umum 1977*. Lembaga Pemilihan Umum
4. *Himpunana Peraturan Dan Petunjuk Pelaksanaan yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara yang Diperoleh Masing-masing Organisasi Untuk Keanggotaan DPR, DPRD TK I, Dan DPRD TK II Daerah Pemilihan Umum Jawa Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 1977*

Selain sumber yang berbentuk dokumen penulis juga mendapatkan sumber-sumber yang berbentuk koran, sumber-sumber tersebut antara lain:

1. Pikiran Rakyat. Bandung: 17 Pebruari 1977
2. Pikiran Rakyat. Bandung: 19 Pebruari 1977
3. Pikiran Rakyat. Bandung: 22 Pebruari 1977
4. Pikiran Rakyat. Bandung: 23 Pebruari 1977
5. Pikiran Rakyat. Bandung: 17 Maret 1977
6. Pikiran Rakyat. Bandung: 15 April 1977

7. Pikiran Rakyat. Bandung: 3 Mei 1977

8. Pikiran Rakyat. Bandung: 17 Mei 1977

B. Sumber Lisan

Untuk melengkapi sumber-sumber tertulis baik literatur maupun dokumen, maka digunakan sumber lisan melalui teknik wawancara. Sjamsuddin (1996: 78) dalam bukunya yang berjudul Metodologi Sejarah mengungkapkan bahwa sejarah lisan (*Oral History*), ingatan lisan (*Oral Reminiscence*) yaitu ingatan tangan pertama yang dituturkan secara lisan oleh orang-orang yang diwawancarai oleh sejarawan.

Penulis mengumpulkan sumber lisan dengan melakukan wawancara kepada beberapa tokoh atau saksi sejarah. Teknik wawancara sebagaimana lazimnya dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan tujuan untuk dapat mengatur dan mengarahkan pembicaraan pada pokok permasalahan. Di bawah ini penulis cantumkan format wawancara yang dijadikan sebagai acuan guna mendapatkan informasi dari para responden.

1. Sejak kapan bapak/ibu bergabung dalam PPP ?
2. Alasan apa yang membuat bapak/ibu tertarik masuk PPP ?
3. Apa jabatan bapak/ibu di dalam PPP pada tahun 1977?
4. Bagaimana proses terjadinya Fusi di Kodya Bandung?
5. Apa nama PPP pada tahun 1971 atau sebelum terjadinya fusi ?
6. Bagaimana penerimaan dari partai-partai yang berfusi di Kodya Bandung ?

7. Bagaimana sikap masyarakat ketika muncul atau berdirinya PPP di Kodya Bandung
8. Apa alasan pemerintah dengan dibuatnya Undang-Undang tentang penyederhanaan partai ?
9. Bagaimana kondisi PPP di Kodya Bandung pasca fusi ?
10. Bagaimana kondisi sosial, politik pada tahun 1977 di Kodya Bandung ?
11. Bagaimana atau seperti apa struktur keorganisasian di dalam PPP di Kodya Bandung tahun 1977?
12. Apa dan bagaimana tugas dari para pejabat PPP saat itu ?
13. Bagaimana pembagian kedudukan dalam kepengurusan di DPC PPP Kodya Bandung ?
14. Apakah terdapat konflik di tubuh partai sendiri (PPP)
15. Bagaimana solusi dari konflik tersebut ?
16. Bagaimana kondisi sospol di Kodya Bandung menjelang Pemilu ?
17. Bagaimana proses kampanye yang dilakukan parpol-parpol ?
18. Bagaimana persiapan dari PPP dalam menghadapi Pemilu atau kampanye?
19. Berapa kursi secara keseluruhan yang ditawarkan oleh pemerintah untuk DPRD Kodya Bandung ?
20. Berapa jumlah calon dari PPP yang akan duduk di DPRD ?
21. Siapa saja yang masuk menjadi anggota dewan dari PPP di DPRD Kodya Bandung tahun 1977 ?
22. Dalam hal kampanye bagaimana upaya PPP dalam menggalang massa ?
23. Apakah ada kendala dalam menggalang massa ?

24. Apakah ada unsur sensor alat-alat atau pamflet kampanye ?
25. Apa saja program yang ditawarkan oleh PPP ketika kampanye ?
26. Apa pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye baik yang dilakukan oleh PPP maupun kontestan lain ?
27. Bagaimana persiapan menjelang pemungutan suara ?
28. Berapa jumlah TPS di Kodya Bandung tahun 1977 ?
29. Apakah ada saksi dari PPP ketika pemungutan suara ?
30. Adakah yang menjadi panitia dari PPP di TPS-TPS yang disediakan ?
31. Apakah ada kecurangan ketika pemungutan suara ?
32. Apakah ada rekayasa hasil Pemilu tahun 1977 ?
33. Apakah saat itu sudah luber?
34. Bagaimana menurut bapak/ibu dengan adanya kebijakan pemerintah tentang *Monoloyalitas*, dan *Floating Mass* (massa mengambang)?
35. Bagaimana kondisi setelah Pemilu ?

Selain itu untuk menghindari adanya ketidak jelasan informasi atau jawaban yang diberikan oleh narasumber, maka penulis mengajukan pertanyaan lanjutan dengan tidak menggunakan daftar pertanyaan.

Di bawah ini akan penulis cantumkan nama-nama orang yang menjadi narasumber dalam pencarian sumber lisan. Penulis mendapatkan nama-nama orang tersebut yaitu dengan mendatangi langsung kantor DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PPP Kota Bandung yang beralamat di Jalan Sudirman, Gang Ibnu Karees Kota Bandung. Orang-orang yang menjadi narasumber tersebut antara lain:

1. Drs H.M. Idri suryana KW, 65 tahun, pada tahun 1977 sebagai wakil ketua PPP Kodya Bandung
2. KH Amar Shaleh, 72 tahun, menjabat sebagai Anggota Dewan DPRD TKII Kodya Bandung pada tahun 1977
3. H. Aef Arifin, 73 tahun, Koodinator PPP, dan Anggota Dewan DPRD TK II Kodya Bandung, tahun 1977
4. A.A. Hidayatullah, 53 tahun, menjabat sebagai anggota Komcam Cidadap, tahun 1977
5. Drs Ramlan Sasmita, M.pd. 65 tahun, menjabat sebagai Wakil Ketua PPP Kodya Bandung, tahun 1977
6. H. Ngatman, 61 tahun, menjabat sebagai Komcam Bojong Lowa, tahun 1977
7. Toha Ruhiyat, 62 tahun, menjabat sebagai Wakil Komcam, tahun 1977
8. Aceng Karim, 59 tahun, menjabat sebagai Ketua Komcam Melong, tahun 1977

Para narasumber yang tertera di atas merupakan orang-orang yang berhasil penulis wawancarai. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui proses Pemilu pada tahun 1977 di Kodya Bandung, baik sebagai pelaku atau saksi pada saat itu. Narasumber yang penulis wawancarai jabatan yang milikinya sangat beragam, mulai dari anggota dewan tingkat II Kodya Bandung seperti KH Amar Shaleh beliau mengetahui persis tentang proses Pemilu di Kodya Bandung pada tahun 1977, wakil ketua PPP Kodya Bandung seperti Drs H.M. Suryana KW, dan Drs Ramlan sasmita M.Pd mereka berdua pun banyak memberikan informasi tentang

proses Pemilu, koordinator PPP Kodya Bandung, Aef Arifin hingga di tingkat bawah seperti ketua komisaris kecamatan PPP seperti Aceng Karim wakil ketua komisaris kecamatan PPP, dan juga simpatisan yang mengetahui proses Pemilu di Kodya Bandung pada tahun 1977.

Menurut penulis narasumber yang pernah penulis wawancarai sangat representatif (mewakili) dalam hal memberikan informasi, sehingga penulis berkeyakinan orang-orang yang tercantum di atas adalah pelaku, dan juga saksi dalam proses pemilihan umum tahun 1997 di Kodya Bandung.

2. Kritik

Langkah selanjutnya dari metode sejarah setelah mencari sumber adalah melakukan kritik. Penulis tidak dapat begitu saja menerima sumber-sumber sejarah, tetapi harus terlebih dahulu melalui tahap kritik sumber. Kritik sumber ini merupakan penilaian secara kritis terhadap data dan fakta yang ada sehingga penulis akan mendapatkan fakta dan informasi yang terpercaya mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Menurut Sjamsuddin (1996: 118) fungsi kritik sumber bagi sejarawan erat kaitannya dengan tujuan sejarawan itu mencari kebenaran.

Kritik sumber terbagi menjadi dua yaitu kritik internal dan eksternal. Kritik eksternal adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Kritik ini merupakan suatu penilaian atas asal-usul sumber, atau pemeriksaan atas catatan-catatan peninggalan itu sendiri untuk

mendapatkan semua informasi yang mungkin dan untuk mengetahui apakah sumber yang diperoleh telah mengalami perubahan atau tidak.

Jadi pada dasarnya kritik eksternal merupakan upaya untuk menguji otentisitas dan integritas sumber sejarah. Secara terperinci Sjamsuddin (1996: 104-105) memberikan gambaran bahwa sebelum sumber-sumber tersebut dapat digunakan dengan aman, paling tidak ada lima pertanyaan yang harus dijawab:

1. Siapa yang mengatakan itu ? Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengetahui keberadaan atau identitas dari para pelaku atau saksi tentang proses Pemilu di Kodya Bandung pada tahun 1977. Baik nama, alamat, jabatan, dan juga hal-hal lain yang dapat memberikan kebenaran bahwa narasumber itu adalah orang yang mengatakan atau memberikan informasi sebenarnya.
2. Apakah dengan satu atau cara lain kesaksian itu telah diubah ? Untuk mengetahui kebenaran bahwa informasi yang diberikan oleh narasumber itu telah diubah atau tidaknya, penulis melakukan *cross chek* antara satu sumber dengan sumber lainnya, baik dengan buku atau dengan narasumber lainnya, atau penulis bertanya langsung apakah narasumber memberikan informasinya itu dengan sadar dan benar-benar asli.
3. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh orang itu dengan kesaksian itu ? Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengorek lebih dalam informasi yang diberikan oleh narasumber. Jika terdapat informasi yang kurang jelas penulis berusaha untuk bertanya ulang agar informasi yang dimaksud oleh narasumber tersebut dapat dipahami maksud dan maknanya.

4. Apakah orang yang memberikan kesaksian itu seorang saksi mata yang kompeten, apakah ia mengetahui fakta itu ? Dalam tahapan ini penulis berusaha untuk mengetahui apakah narasumber itu seorang saksi mata yang kompeten tentang proses Pemilu di Kodya Bandung pada tahun 1977. Pada prinsipnya cara untuk mengetahui narasumber itu seorang saksi yang kompeten atau bukan, sama dengan pertanyaan nomor dua, yaitu, *cross chek*, dan bertanya langsung.
5. Apakah saksi itu mengatakan yang sebenarnya dan memberikan kepada kita fakta yang diketahuinya itu ? Tahapan pertanyaan ini merupakan tahapan yang cukup sulit penulis lakukan, karena penulis berusaha untuk memperoleh informasi itu benar-benar asli. Akan tetapi yang penulis lakukan apakah saksi itu mengatakan yang sebenarnya atau tidak, yaitu hanya mengcross cek dengan narasumber lain dan bertanya langsung.

Sedangkan kritik internal adalah kritik terhadap aspek dalam dari suatu sumber atau teks. Sejarawan harus memutuskan apakah sumber-sumber itu dapat diandalkan atau tidak. Kritik internal harus membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh suatu sumber memang dapat dipercaya.

Penulis melakukan kritik sumber dapat mengetahui apakah informasi yang diberikan itu benar-benar bisa dipercaya sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Pada sumber tertulis, penulis melakukan kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal dilakukan dengan cara melihat penulis buku atau dokumen dan kapan buku atau dokumen tersebut dibuat. Sebagai contoh pengarang yang berlatar belakang pendidikan dalam bidang politik, dan

sebagai saksi sejarah Pemilu di Indonesia terutama masa Orde Baru antara lain yaitu, William Liddle, Syamsuddin Haris, Maswadi Rauf, Umaid Radi, M Rusli Karim.

Sedangkan kritik internal dilakukan dengan cara melihat kelengkapan isi buku atau dokumen dan banyaknya kesalahan dalam penulisan. Dalam kritik internal penulis melakukan perbandingan antara isi satu buku dengan buku lainnya yang memudahkan penulis untuk melihat kesesuaian atau pun perbedaan antara satu sumber dengan sumber lainnya.

Kritik internal penulis lakukan dengan cara melakukan *cross chek* (cek silang) dengan membandingkan data dan fakta serta pendapat yang terdapat dalam buku-buku atau dokumen-dokumen yang dikategorikan sebagai sumber utama. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat.

Selain kritik terhadap sumber tertulis, penulis juga melakukan kritik terhadap sumber lisan. Pada tahap ini penulis melakukan kritik internal dan eksternal terhadap data-data yang berasal dari sumber lisan. Kritik eksternal tersebut dilakukan atas pertimbangan dengan memperhatikan beberapa hal seperti: faktor mental dan fisik, perilaku (kejujuran dan sikap sombong) serta usia. Sumber lisan tersebut penulis bandingkan antara satu sumber dengan sumber lainnya.

3. Interpretasi (Penafsiran Sumber)

Setelah melakukan kritik, penulis menempuh langkah selanjutnya yaitu interpretasi atau penafsiran. Tahap ini merupakan tahap pemberian makna terhadap data-data yang melalui tahap kritik menjadi fakta-fakta, yang diperoleh

dalam penelitian. Upaya penyusunan fakta-fakta ini disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Setelah fakta-fakta tersebut dirumuskan dan disimpulkan berdasarkan data yang berhasil diperoleh, maka fakta tersebut kemudian disusun dan ditafsirkan, suatu fakta dihubungkan dengan fakta lainnya, sehingga menjadi sebuah rekonstruksi yang memuat penjelasan dari pokok-pokok permasalahan.

Terdapat dua macam cara penafsiran yang ada kaitannya dengan faktor-faktor pendorong sejarah yaitu, *pertama* determinisme, dan yang *kedua* kemauan bebas manusia serta kebebasan manusia mengambil keputusan (Sjamsuddin, 1996: 161). Diantara bentuk-bentuk penafsiran deterministik itu ialah: *Pertama* determinisme rasial, *kedua* penafsiran geografis, *ketiga* interpretasi ekonomi, *keempat* penafsiran orang besar, *kelima* penafsiran spiritual atau idealistik, *keenam* penafsiran ilmu dan teknologi, *ketujuh* penafsiran sosiologis, *kedelapan* penafsiran sintesis. (Sjamsuddin, 1996: 161-165).

Berdasarkan hal tersebut, Pemilu tahun 1977 di Indonesia dan khususnya di Kodya Bandung merupakan Pemilu yang dianggap suatu keberhasilan bagi partai-partai politik Islam yang ditandai dengan adanya peningkatan suara yang disebabkan fusi partai ke dalam satu wadah yang bernama Partai Persatuan Pembangunan. Hal ini merupakan kekuatan bagi umat Islam untuk mewujudkan cita-citanya. Akan tetapi dilain pihak dengan adanya fusi partai menandai berakhirnya sejarah partai-partai politik Islam di kancah nasional. Selain dari itu Pemilu tahun 1977 merupakan suatu persaingan kekuasaan yang dimanipulasi

oleh penguasa (pemerintah), dan merupakan pertarungan dua kekuatan antara Islam dengan pemerintah (Golkar).

Untuk mengkaji dan memahami suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, pendekatan merupakan suatu hal yang penting dalam proses penelitian. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan interdisipliner, yaitu: dengan menggunakan bantuan disiplin ilmu-ilmu sosial dalam analisis-analisisnya. Hal ini bertujuan agar dapat mengungkap suatu peristiwa sejarah secara utuh dan menyeluruh (Kartodirdjo, 1993: 87), dengan menggunakan berbagai konsep dari disiplin ilmu sosial maka permasalahan akan dilihat dari berbagai dimensi sehingga pemahaman tentang permasalahan itu baik keluasaan maupun kedalamannya akan semakin jelas (Sjamsuddin, 1996: 201).

C. Laporan Penelitian

Laporan penelitian merupakan langkah terakhir yang ditempuh oleh penulis setelah melalui beberapa rangkaian kegiatan dalam penelitian, yaitu dengan membuat laporan penelitian atau historiografi. Pada tahap historiografi, sejarawan mengerahkan seluruh daya pikirannya terutama penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena pada akhirnya ia harus menghasilkan sebuah sintesis dari seluruh hasil penelitiannya itu dalam suatu penulisan yang utuh (Sjamsuddin, 1996: 153).

Laporan hasil penelitian ini disusun dalam bentuk tulisan sejarah yang jelas dalam gaya bahasa yang sederhana, ilmiah, serta menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, dan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Adapun penulisan hasil penelitian ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan studi akademis tingkat sarjana pada Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia.

